

IMPLEMENTASI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (STUDI PADA DESA TIMBANGAN KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR)

Retno Pratiwi¹⁾, Isabella²⁾, Novia Kencana, S.IP., M.PA³⁾, Harsi Romli⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾Program Studi Ilmu Pemerintahan, ⁴⁾Program Studi Akutansi, Universitas Indo Global Mandiri Palembang
JL. Jend. Sudirman No. 629 KM 4 Palmebang Kode Pos 30129

Email : tiwitohir1@gmail.com¹⁾, isabella@uigm.ac.id²⁾, kencananovia@uigm.ac.id³⁾, harsi_romli@uigm.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how to Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. The research method used in this research is qualitative research. The results of the analysis and findings in the field from this research are (1) Communication seen from the delivery of information, clarity of information and socialization has been going well, this can be seen from the socialization and coordination carried out regularly. (2) Resources are also sufficient because both human resources are 99 people who are indeed competent people and have attended a lot of training and coaching. (3) The disposition of this indicator, the researcher found that there were deviations made by PKH facilitators during the disbursement of aid funds that were not in accordance with the Guidelines for the Implementation of Expected Families and the Technical Guidelines for the Distribution of PKH Assistance. (4) The Bureaucratic Structure in this indicator The Bureaucratic Structure is clear because the SOP in the implementation of this assistance is guided by the technical book for distributing PKH assistance and the guidebook for implementing the family of hope. Based on the results of the research and discussion conducted, the researcher can conclude that the Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir has been going well although there are several obstacles but can be overcome by the parties involved in this assistance program. The suggestion in this study is that PKH facilitators should always be given training and training with the theme of ethics and behavior and for the sustainability of this assistance program it should be replaced with other assistance programs by providing business capital to underprivileged residents in order to foster an independent attitude and improve the economy.

Keywords : *Implementation, social welfare, PKH*

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Indralaya Utara Desa Timbangan Kabupaten Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil analisis dan temuan di lapangan dari penelitian ini adalah (1) Komunikasi dilihat dari penyampaian informasi, kejelasan informasi dan sosialisasi sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan secara. (2) Sumber Daya juga sudah cukup karena baik dari sumber daya manusianya berjumlah 99 orang yang memang merupakan orang-orang yang berkompeten dan telah banyak mengikuti pelatihan maupun pembinaan. (3) Disposisi pada indikator ini peneliti menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pendamping PKH pada saat pencairan dana bantuan yang tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PKH. (4) Struktur Birokrasi pada indikator ini Struktur Birokrasi sudah jelas karena SOP dalam pelaksanaan bantuan ini berpedoman pada buku teknis penyaluran bantuan PKH dan buku pedoman pelaksanaan keluarga harapan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan tetapi dapat diatasi oleh pihak yang terlibat dalam program bantuan ini. Saran dalam penelitian ini adalah para pendamping PKH harus selalu diberikan pelatihan dan training dengan tema etika dan perilaku dan untuk keberlangsungan program bantuan ini sebaiknya digantikan dengan program bantuan lain dengan cara pemberian modal usaha kepada warga tidak mampu agar dapat menumbuhkan sikap mandiri dan meningkatkan perekonomian.

Kata Kunci : *Implementasi, Kesejahteraan Sosial, PKH*

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2015 jumlah orang miskin 28,59 juta atau 11,22%. Memasuki Maret 2016 penduduk miskin tercatat 28,01 juta atau 10,86%. Kemudian Maret 2017 penduduk miskin tercatat 27,77 juta atau 10,64%. Terakhir pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat 25,95 juta orang atau 9,82%.

Dari data juga disebutkan jumlah orang miskin di daerah perkotaan periode 2018 tercatat 10,14 juta turun 128,2 ribu orang dibandingkan periode September 2017 sebesar 10,27 juta. Sementara itu di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018). Sedangkan dari segi persentase penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat 7,02% lebih rendah dibanding periode September 2017 sebesar 7,26%. Sementara itu, berdasarkan sumber data BPS persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ialah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan.

Nazara dalam Nurwati (2008:5) mengemukakan 5 faktor yang dianggap dapat mempengaruhi terjadinya kemiskinan, yaitu : a) Pendidikan; b) Jenis pekerjaan; c) Gender; d) Akses terhadap pelayanan kesehatan dasar; e) Infrastruktur dan lokasi geografis.

Menurut Bappenas yang dikutip Wardan (2009:14) memberikan penjelasan tentang kemiskinan yaitu kondisi seorang kelompok prang laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan umumnya diukur dengan tingkat pendapatan, dan pada dasarnya dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Kemiskinan *Absolut*

Seorang yang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan.

2. Kemiskinan Relatif

Kedua perbandingan antara kelompok dengan tingkat pendapatannya sudah diatas garis kemiskinan. Sehingga sebenarnya tidak dikatakan miskin dibandingkan dengan masyarakat lainnya.

Di dalam pembukaan UUD 1945 sudah tercantum dengan jelas untuk mensejahterakan masyarakat dalam berbagai aspek terutama ekonomi. Maka terkait dengan hal ini pemerintah memberikan solusi membuat program bantuan yang bertujuan untuk meminimalisir kemiskinan. Diantara banyaknya program-program bantuan yang dibuat oleh pemerintah, disini peneliti ingin membahas salah satu program kebijakan bantuan sosial yang dibuat pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan PKH dijalankan sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang No.40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial, Undang-Undang No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Program Keluarga Harapan adalah bantuan berupa uang secara tunai dan beras kepada Rumah Tangga yang Miskin (RTM) yang memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang dibuat pemerintah. Program ini dibawah Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di kota atau pusat maupun di daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Program ini melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Pembangunan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PT. POS Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia. Berdasarkan Permensos No.1 tahun 2018 Penerima bantuan ini adalah ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Menurut data BPS kabupaten Ogan Ilir memiliki jumlah penduduk sebanyak 425.032 jiwa, memiliki luas wilayah sebesar dengan Secara astronomis wilayah Ogan Ilir terletak antara 3°02' sampai 3°48' Lintang Selatan dan 104°20' sampai 104°48' Bujur Timur. Sedangkan secara geografis posisi kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang di sebelah Utara, Kabupaten OKU di sebelah Selatan, Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih di sebelah Barat, serta Kabupaten OKI dan Kabupaten OKU Timur di sebelah Timur. Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, dimana Kecamatan Rambang Kuang adalah kecamatan terluas, dengan luas wilayah 528.82 km². Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Rantau Panjang dengan luas wilayah 40.85 km². dengan jumlah tenaga pendidik yang semakin banyak dan tingkat kepadatan penduduk semakin tinggi, dikhawatirkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan Timbangan ini belum merata.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS,2019) pada tahun 2018-2019 Garis Kemiskinan di Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 416.098 dan Jumlah Penduduk Miskin mencapai 55.87. Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ogan Ilir mencapai 13.19% disana terbagi menjadi 2 kategori kemiskinan yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 2.20% dan Indeks Keperawatan Kemiskinan (P2) 0.51%.

Menurut salah satu penerima bantuan PKH berdasarkan wawancara observasi yang dilakukan pada setiap pencairan selama ini terjadi adanya pemotongan

penyaluran bantuan dengan alasan untuk biaya administrasi yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pemotongan ini dilakukan pada setiap dana PKH keluar, adapun potongan yang dilakukan berkisar Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 100.000 per orang. Hal ini mencerminkan bahwa ada kesalahan atau penyimpangan pada disposisi yang dilakukan oleh implementor atau pendamping PKH, karena dalam teori Edward mengemukakan bahwa faktor disposisi menitikberatkan pada sikap dan perilaku dari implementor, suatu kebijakan atau program akan berjalan dengan baik apabila implementor memiliki sikap dan komitmen yang baik.

Bantuan PKH dialokasikan ke daerah-daerah yang dianggap telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan bantuan tersebut. Khusus untuk Kabupaten Ogan Ilir, jumlah penerima PKH pada tahun 2017 yang tersebar di 16 Kecamatan. Ada 16 Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan ini, salah satunya adalah Kecamatan Indralaya utara Desa Timbangan. Desa Timbangan merupakan salah satu Desa yang menjadi penerima bantuan PKH, Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih kurang memadai dan belum bisa memenuhi kebutuhan absolut.

Tabel 1.1 Jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) Di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah RSTM
1	Indralaya	1.555
2	Indralaya Selatan	934
3	Indralaya Utara	732
4	Kandis	772
5	Lubuk Keliat	1.036
6	Muara Kuang	796
7	Payaraman	762
8	Pemulutan	3.106
9	Pemulutan Barat	1.034
10	Pemulutan Selatan	1.729
11	Rambang Kuang	544
12	Rantau Alai	1.068
13	Rantau Panjang	1.349
14	Sungai Pinang	1.617
15	Tanjung Batu	1.068
16	Tanjung Raja	1.997

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017

Berdasarkan data diatas penyaluran bantuan ini dilakukan 4 tahap dalam setahun, tahapan pertama dilakukan pada bulan Januari, tahap kedua di bulan April, tahap ketiga di bulan Juli dan tahap keempat di bulan Oktober. PKH diharapkan dapat memberikan *income effect* kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui pengurangan beban ekonomi dalam hal pengeluaran rumah tangga.

Dalam penyalurannya, penerima manfaat bantuan PKH di Kabupaten Ogan Ilir berjumlah 30.170 KPM. Menurut Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan disalurkan

kepada 30.170 yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir memiliki sebanyak 16 kecamatan dan terdapat 227 desa serta 14 kelurahan. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir adalah Kecamatan Indralaya Utara yang merupakan satu dari 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Indralaya Utara dengan Ibu Kota Kecamatan di Desa Payakabung dan memiliki 15 desa serta satu kelurahan, yakni Bakung, Lorok, Parit, Purnajaya, Payakabung, Tanjung Baru, Tanjung Pering, Sungai Rambutan, Soak Batok, Suka Mulia, Pulau Kabal, Tanjung Pule, Permata Baru, Palembang, Pulau Semambu, dan Timbangan. Bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Indralaya Utara sudah berjalan keseluruhan sebanyak 16 Desa yang ada di Indralaya Utara. Dasar atau pedoman untuk keluarga miskin agar mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdata dan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah didata oleh pemerintah sebelumnya. Setelah keluarga miskin tersebut telah terdata DTKS oleh pemerintah. Berikut data mengenai jumlah keluarga miskin yang termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan jumlah penerima bantuan BPNT atau yang disebut dengan KPM di Kecamatan Indralaya Utara tahun 2017.

Tabel 1.2 Jumlah Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kepala Keluarga dan KPM di Indralaya Utara Tahun 2017

NO	DESA	DTKS	KPM
1	Bakung	166	79
2	Lorok	101	41
3	Palemraya	164	63
4	Parit	74	20
5	Payakabung	174	60
6	Permata Baru	95	39
7	Purnajaya	117	31
8	Pulau Kabal	95	50
9	Pulau Semambu	206	75
10	Suak Batok	299	183
11	Suka Mulia	112	61
12	Sungai Rambutan	347	31
13	Tanjung Baru	135	66
14	Tanjung Pering	124	29
15	Tanjung Pule	155	33
16	Timbangan	228	79
Jumlah		2592	940

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir

Dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diatas dapat dilihat bahwa jumlah kepala keluarga miskin yang ada di Kecamatan Indralaya Utara berjumlah 2592 keluarga. Salah satu Desa Kecamatan Indralaya Utara yang telah melaksanakan program Bantuan PKH ini adalah Desa Timbangan. Daerah Desa Timbangan merupakan satu dari enam belas desa dari Kecamatan Indralaya Utara yang berada di Jalan Raya Lintas Timur Palembang-Prabumulih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Ogan Ilir 2017 menyatakan jumlah dan

kepadatan penduduk Kelurahan Timbangan mencapai 10.269 jiwa. Jumlah penduduk di Kelurahan Timbangan ini merupakan jumlah penduduk yang paling banyak di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Sementara untuk data DTKS keluarga miskin berdasarkan Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir jumlah keluarga miskin Kelurahan Timbangan berjumlah 228 kepala keluarga.

Oleh karena itu, jumlah keluarga miskin yang tidak sedikit di Kelurahan Timbangan ini maka disalurkan dana bantuan sosial seperti Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan oleh pemerintah kepada desa tersebut. Tercatat bahwa berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir jumlah 228 Kepala Keluarga. Satu Kepala Keluarga ada yang menerima Bantuan PKH berkisar 4 orang anggota keluarga, jadi di Kelurahan Timbangan berjumlah 789 orang. Dari total tersebut, membuktikan bahwa bantuan tersebut sudah diterima dan sangat dirasakan oleh keluarga miskin yang ada di Kelurahan Timbangan secara umum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019-2020 di Kecamatan Indralaya Utara Desa Timbangan Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Indralaya Utara Desa Timbangan Kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan informasi bahkan masukan untuk pihak yang ingin melakukan penelitian ulang dengan menggunakan metode penelitian dan informan-informan yang berbeda.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi *stakeholder* atau pihak yang berhubungan dengan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menanggulangi kemiskinan.

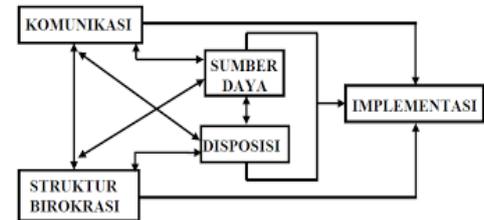
2. Pembahasan

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III



Sumber : Yulius Tandigoa (2016:31)

a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah memang merupakan Program Nasional, Program Kementerian Sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan memfokuskan dua komponen yaitu pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan) dan kesehatan (meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita) penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun, namun dalam penelitian ini terdapat satu komponen lagi yaitu Keterampilan Usaha (meningkatkan ekonomi keluarga dengan mengadakan kegiatan ekonomi produktif). Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini mencoba untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu

memutus rantai kemiskinan. Desa Timbangan mendapatkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini sejak tahun 2014 hingga sekarang berdasarkan data warga yang terdaftar di DTKS.

Desa Timbangan merupakan satu dari enam belas desa dari Kecamatan Indralaya Utara yang berada di Jalan Raya Lintas Timur Palembang-Prabumulih. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Ogan Ilir 2017 menyatakan jumlah dan kepadatan penduduk Desa Timbangan mencapai 10.269 jiwa. Jumlah penduduk di Desa Timbangan ini merupakan jumlah penduduk yang paling banyak di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Sementara untuk data DTKS keluarga miskin berdasarkan Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir jumlah keluarga miskin Desa Timbangan berjumlah 228 kepala keluarga. Adapun Rekapitulasi data penerima bantuan PKH di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Data Penerima PKH di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir

No	Kategori Usia	L	P
1	0-20 Tahun	164	265
2	21-40 Tahun	75	86
3	41-60 Tahun	54	73
4	61-80 Tahun	30	50
5	81-100 Tahun	-	1
Jumlah		323	475
TOTAL		798 Orang	

Sumber : Diolah Penulis

Peneliti menggunakan teori dari Edward III sebagai indikator untuk melihat sejauh mana implementasi . Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

A. Komunikasi

Komunikasi yaitu interaksi yang menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi penyampaian informasi yang efektif antara pelaksana program dengan para kelompok sasaran (masyarakat). Komunikasi sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasi penyampaian informasi seluruh pihak terkait dengan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam pelaksanaan PKH komunikasi penting perannya dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan dengan program terlebih program ini merupakan program dari pemerintah pusat yang membutuhkan suatu bentuk penyampaian informasi yang baik hingga sampai kepada lapisan yang paling bawah. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) komunikasi menjadi sangat penting dan memegang kunci penting karena interaksi sesama pendamping, pendamping dan operator, pendamping dan para *stakeholder* (Aparat Pemerintah mulai dari level Kabupaten sampai RT, dengan masyarakat peserta PKH, serta instansi terkait) akan sangat menentukan keberhasilan dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir terkait dengan indikator komunikasi dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pihak implementor kepada masyarakat sudah berjalan dengan cukup baik sesuai pedoman pelaksanaan PKH walaupun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyampaian informasi kepada warga penerima bantuan tetapi dapat diatasi oleh pihak implementor dan koordinasi yang dilakukan dalam Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini juga sudah berjalan baik dan jelas. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang disampaikan oleh Bapak IR. Edi Yusmadi, Bapak Rianandra, Bapak Wiwin Muharwarna, Bapak Efran, Bapak Rian Ibu Weni Silvia dan Ibu Ikhwana.

Dari segi pemahaman informan terhadap komunikasi yang disampaikan implementor terkait Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Timbangan bahwasanya pemahaman implementor pada saat penyampaian informasi kepada masyarakat sudah cukup baik dan jelas, menggunakan bahasa yang juga mudah dipahami oleh masyarakat yang menerima bantuan PKH dan masyarakat kini sudah memahami tentang tujuan dan manfaat diberikannya bantuan PKH ini. Hal ini dibuktikan dari pendapat yang disampaikan oleh Ibu Waliyah, Ibu Karni, Ibu Sakimah, dan Ibu Hidayah sebagai warga yang mendapat bantuan PKH di Desa Timbangan.

Dengan adanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Timbangan ini masyarakat sangat merasa terbantu dari segi pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan anak, peningkatan keterampilan bagi masyarakat, kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta pemenuhan bagi lansia dan disabilitas berat. Hal ini dibuktikan dari pendapat yang disampaikan oleh warga penerima bantuan PKH di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir.

B. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud meliputi staf yang memadai dan keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas untuk melaksanakan pelayanan publik. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor dan kelompok sasaran. Sumber daya anggaran dan sumber daya fasilitas juga sangat dibutuhkan karena untuk menunjang keberhasilan sebuah program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bahwa untuk indikator sumber daya yang ada dalam pelaksanaan bantuan PKH dilihat dari sumber daya manusia bahwa untuk dari implementor PKH sudah sangat cukup dan sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program PKH. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Rianandra dan Bapak Wiwin Muharwarna. Untuk masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Timbangan untuk sejauh ini tidak ada kekurangan dan

jumlah nama yang mendapat bantuan PKH ini semuanya sudah sesuai dengan yang terdaftar di DTKS.

Sehubungan dengan kualitas dari pihak Pendamping PKH dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi pendamping PKH mempunyai proses dan tes yang dilakukan misalnya adanya latar belakang pendidikan minimal D3 atau pun S1, selain mengikuti tes para pendamping PKH juga harus mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh kementerian. Selain itu setelah masuk dan sah menjadi pendamping PKH mereka juga diberikan pelatihan agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, tidak hanya itu mereka juga dituntut untuk bisa merubah pola pikir masyarakat penerima manfaat agar bisa menjadi orang yang berguna dan dapat secara bertahap memperbaiki status perekonomian. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rian dan Ibu Putri Amelia.

C. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Faktor disposisi lebih menitik beratkan pada sikap dan perilaku dari implementor, kebijakan atau program akan berjalan dengan baik apabila implementor memiliki sikap dan komitmen sesuai dengan pembuat kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pada indikator disposisi, untuk implementor dalam pelaksanaan bantuan PKH di Desa Timbangan terdapat penyimpangan pada watak dan sifat tidak jujur tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PKH. Dimana pendamping yang sering meminta uang lebih kepada masyarakat dengan alasan untuk pengurusan prosedur pencairan dana, kesewenangan dalam memegang kartu ATM penerima bantuan hingga pengambilan dana tanpa pemberitahuan pencairan terhadap penerima PKH. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Rianandra selaku Koordinator PKH Kabupaten.

- Temuan Dilapangan

Temuan dilapangan adalah deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Semua data yang didapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Dalam pelaksanaan bantuan PKH di Desa Timbangan terdapat penyimpangan pada indikator disposisi yang dilakukan oleh salah satu pendamping PKH. Penyimpangan disposisi ini terlihat dari sikap kebiasaan pendamping PKH yang sering meminta uang lebih kepada masyarakat pada saat pencairan dana PKH dengan alasan untuk pengurusan prosedur pencairan dana, kesewenangan dalam memegang kartu ATM dan pencairan dana penerima bantuan tanpa pemberitahuan terhadap KPM. Namun setelah masyarakat melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pendamping ini ke Sekretariat UPPKH Kabupaten Ogan Ilir, pengaduan ini mendapatkan tindakan tegas dari Sekretariat UPPKH. Melalui proses yang sangat panjang mulai dari

pengumpulan bukti-bukti kebenaran akan adanya penyimpangan yang dilakukan pendamping PKH ini dilapangan. Meskipun memerlukan waktu dan proses tetapi kejelasan dari kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pendamping ini mendapatkan kebenaran memang benar setiap pencairan dana PKH pendamping PKH melakukan pemotongan uang bantuan tersebut dari Rp. 25.000 – Rp. 100.000 dan kartu ATM tidak dipegang oleh KPM melainkan dipegang oleh pendamping PKH tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya video rekaman dan saksi pada saat pendamping tersebut sedang melakukan penyimpangan itu.

D. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi menurut Edwards memiliki dua karakter yaitu prosedur-prosedur kerja, ukuran-ukuran dasar atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi birokrasi. SOP menjadi sebuah pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi yang memberikan perbedaan tugas pokok, fungsi, dan wewenang. Pada indikator ini Peneliti akan ingin mengetahui SOP yang menjadi pedoman bagi implementor dalam pelaksanaan bantuan PKH.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada informan terkait dengan indikator struktur birokrasi dalam pelaksanaan bantuan PKH dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SOP yang ada dalam Pelaksanaan bantuan PKH di Kabupaten Ogan Ilir Desa Timbangan telah berjalan dengan baik dengan berpedoman pada buku petunjuk teknis Penyaluran Bantuan PKH dan buku Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan dan mengikuti arahan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Tim Koordinasi Tingkat Provinsi, Tim Koordinasi Tingkat Nasional.

Sedangkan untuk tugas dan wewenang dalam pelaksanaan bantuan PKH menurut Bapak IR. Edi Yusmadi dan Bapak Wiwin Muharwarna telah dibagi sesuai tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan setiap akhir tahun dilakukannya evaluasi untuk mengetahui kompeten dan komitmen implementor itu sendiri.

3. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan tetapi dapat diatasi oleh pihak yang terlibat dalam program bantuan ini. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah merupakan Program Nasional, Program Kementerian Sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin yang terdaftar dalam

data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan memfokuskan dua komponen yaitu pendidikan (meningkatkan taraf pendidikan) dan kesehatan (meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita) penyandang disabilitas berat dan lansia diatas 70 tahun. Program bantuan ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori dari Edward III yang mana terdapat empat indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data secara primer maupun sekunder dalam Implementasi Bantuan PKH di Desa Timbangan terdapat kesalahan/penyimpangan disposisi yang dilakukan oleh pendamping PKH di Desa Timbangan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III bahwa disposisi menitikberatkan pada sikap dan perilaku implementor, suatu kebijakan atau program dapat berjalan dengan baik apabila implementor memiliki sikap dan komitmen yang baik, dan sudah jelas tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan bahwa bantuan ini tidak dipungut biaya apapun.

Penyimpangan disposisi ini terlihat dari sikap kebiasaan pendamping PKH yang sering meminta uang lebih kepada masyarakat pada saat pencairan dana PKH dengan alasan untuk pengurusan prosedur pencairan dana, kesewenangan dalam memegang kartu ATM dan pencairan dana penerima bantuan tanpa pemberitahuan terhadap KPM. Namun setelah masyarakat melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pendamping ini ke Sekretariat UPPKH Kabupaten Ogan Ilir, pengaduan ini mendapatkan tindakan tegas dari Sekretariat UPPKH. Melalui proses yang sangat panjang mulai dari pengumpulan bukti-bukti kebenaran akan adanya penyimpangan yang dilakukan pendamping PKH ini dilapangan. Meskipun memerlukan waktu dan proses tetapi kejelasan dari kasus penyimpangan yang dilakukan oleh pendamping ini mendapatkan kebenaran memang benar setiap pencairan dana PKH pendamping PKH melakukan pemotongan uang bantuan tersebut dari Rp. 25.000 – Rp. 100.000 dan kartu ATM tidak dipegang oleh KPM melainkan dipegang oleh pendamping PKH tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya video rekaman dan saksi pada saat pendamping tersebut sedang melakukan penyimpangan itu.

Oleh sebab itu sekarang untuk meminimalisir masalah-masalah penyimpangan seperti ini Sekretariat UPPKH Kabupaten Ogan Ilir bersama Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Tim Koordinasi Tingkat Provinsi, dan Tim Koordinasi Tingkat nasional lebih memperbanyak pelatihan dan pembinaan bagi pendamping PKH agar kemampuan pendamping dapat bertambah dan menanamkan sikap jujur serta berkomitmen dalam pelaksanaan PKH sesuai dengan Prosedur Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan PKH.

Sedangkan indikator lainnya seperti Komunikasi sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari adanya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan secara rutin

oleh pihak implementor dalam pelaksanaan PKH di Desa Timbangan. Dari indikator Sumber Daya juga sudah cukup karena baik dari sumber daya manusianya berjumlah 99 orang yang memang merupakan orang-orang yang berkompeten dan telah banyak mengikuti pelatihan maupun pembinaan. Sumber daya fasilitas yang didapatkan pihak pendamping sebagai membantu menunjang pelaksanaan tugas seperti bantuan laptop dan motor. Indikator berikutnya yaitu Struktur Birokrasi sudah jelas karena SOP dalam pelaksanaan bantuan ini berpedoman pada buku teknis penyaluran bantuan PKH dan buku pedoman pelaksanaan keluarga harapan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, selanjutnya saran yang dapat diberikan peneliti dalam Implementasi Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir agar dapat berjalan dengan optimal, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi yang terjalin harus tetap dan terus berjalan antara para implementor dan kelompok sasaran.
2. Para pendamping PKH harus terus berupaya agar masyarakat lebih proaktif dalam mengikuti sosialisasi dan kegiatan P2K2 agar salah satu tujuannya yaitu membuat masyarakat mandiri dengan memberikan keterampilan yang bisa dijadikan mata pencarian untuk memperbaiki perekonomian.
3. Para pendamping PKH harus lebih meningkatkan sikap jujur dan konsisten terhadap pekerjaan yang sedang dijalani. Dalam hal ini Kementerian Sosial harus memberikan pelatihan dan training bagi para pendamping PKH dengan tema etika dan perilaku.
4. Para pendamping PKH harus selalu memberikan motivasi dan arahan bagi para penerima bantuan agar dapat menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan.
5. Untuk Pemerintah harapan kedepannya untuk keberlangsungan bantuan PKH ini sebaiknya digantikan dengan program bantuan yang memberikan modal usaha kepada masyarakat, karena sebelumnya sudah mendapatkan ilmu dan keterampilan dari kegiatan P2K2 yang membuat masyarakat dapat mandiri dan juga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi bagi masyarakat tersebut.

Daftar Pustaka

- Afrizal. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustina, R. 2014. *Analisa Implementasi Program Otonomi Desa Dalam Pembangunan Sarana*

- Olahraga di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Suharno 2008: 187. HUSNA, E.
- Ardianti, E. 2018. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Bukit.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir BPS, 2019.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia BPS, 2018.
- Bestari Kota Tanjungpinang. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang*. Eni Ardianti 2018 Bappenas yang dikutip Wardan 2009:14.
- Bangun, H., Siagian, M., & Humaizi, H. 2019. The Effectiveness of the Ministry of Social Family's Hope Program (Program Keluarga Harapan) in Increasing the Welfare of the District of Medan Johor. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 6(4), 125-134. Akhmad Rozi 2011.
- diakses dari internet <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/09/pengertian-kesejahteraan> sosial.html pada tanggal 13 Februari 2020.
- Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. 2014. Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1-9.
- Garis Kemiskinan BPS diakses pada tanggal 15 Februari 2020.
- Haris, A. M. A. 2018. Masalah Kemiskinan Suatu Tantangan Bagi Profesi Pekerja Sosial. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 1(1). Tjokrowinoto dalam Sulistiyani 2017:27 Sulistiyani 2017:27-28.
- Ilo, W. D. F. Z. A. 2020. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI NAGARI TANJUANG BUNGO KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Jurnal Manajemen Kompeten*, 2 (2). Nazara dalam Nurwati 2008:5.
2017. *IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI UED-SP DESA BALAI MAKAM KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Grindle dalam Abdul Wahab 2005.
- Iqbal Nugraha., 2018, IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH UNIT PELAKSANA PKH (UPPKH) DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,
- ISNANI, R. 2018. EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KARANG REJO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN. Sulistiyani 2017:29-30.
- Kemensos RI 2019 diakses pada 26 Februari 2020.
- LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2017 diakses pada 3 Maret 2020.
- Laluhang, S. M. 2015. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(7).
- Wahab, Solichin Abdul. 2016. *Analisis Kebijakan : Dari formulasi ke penyusunan Model "Implementasi Kebijakan Publik"*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurfahira Syamsir., 2014, EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KARANG REJO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN.
- Panduan Umum PKH 2016:20-22 diakses pada 7 Maret 2020.
- Panduan Umum PKH 2016:13-14 diakses pada 7 Maret 2020.
- Panduan Umum Kelurahan/Desa Timbangan Kecamatan Ogan Ilir 2021.
- PUTRI, A. A. A. P. A., ARNAZTIKHA, A., Lipneldi, L., & Suratman, S. *ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR* (Doctoral dissertation, Universitas Bengkulu). Suratman 2016.
- Putri, N. 2018. IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) OLEH PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PPKH) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PENDIDIKAN (Studi di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis). *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 133-140.
- Rani Isnani., 2018, EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KARANG REJO KECAMATAN NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN.
- Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A. 2016. Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi Uho*, 1(1). Menurut Chambers sebagaimana dikutip oleh Nasikun.
- Sawito, I. 2014. *IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MP) DI DESA TABING KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Browne dan Wildavsky Usman, 2004:7, Syauckani dkk 2004 : 295.
- Sumber PKH Ogan Ilir 2017 diakses pada 7 Maret 2020.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran*

- George Edwards*. Yogyakarta : Lukman Offset.
- Tlonaen, Y. B., Hardiyanto, W. T., & Diahloka, C. 2015. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1).
- Usman, C. 2014. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(001).
- Virgoreta, D. A. 2015. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 1-6.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : DAPS.
- Yudistari, A. R. 2012. Sistem Pengambilan Keputusan Kelayakan Sekolah Mendapatkan Status RSBI Studi Kasus SMA RSBI Didki Jakarta. *Prosiding KOMMIT*.